

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
(Studi Kasus Perumusan Kebijakan Desa Wisata di Desa Ketenger,
Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas)
TOURISM DEVELOPMENT POLICY
(A Case Study of Tourism Village Policy in the Village of Ketenger, Subdistrict of
Baturraden, Banyumas Regency)

Oleh :

Muchtar Wisnu Wardoyo dan Bahtarudin
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNSOED

(Diterima : 28 Januari 2003, disetujui : 14 Pebruari 2003)

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari ketertarikan mengkaji proses perumusan kebijakan di Desa Wisata Ketenger yang merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas. Melalui penelitian ini dikaji bagaimana proses perumusan kebijakan Desa Wisata itu terjadi ? Seberapa jauh keterlibatan masyarakat setempat dalam proses tersebut, bagaimana perkembangan kebijakan tersebut selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian, di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif. Untuk menetapkan keabsahan data, digunakan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan proses perumusan kebijakan Desa Wisata berlangsung secara bottoms up, artinya gagasan maupun ide dan perencanaannya berasal dari masyarakat desa itu sendiri, sedangkan pemerintah kabupaten sampai desa hanya memberikan bimbingan dan pembinaan. Keterlibatan masyarakat sangat tinggi dan penyusunan agenda berjalan secara demokratis. Sikap para pejabat pemerintah kabupaten sampai desa sangat mendukung. Prospeknya cukup menjanjikan, namun untuk penyerapan tenaga kerja sementara belum dapat dilaksanakan. Desa Wisata Ketenger hendaknya mulai memikirkan untuk mengupayakan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan dan membuat publikasi sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, agar mereka tertarik mengunjungi dan mengetahui keberadaan Desa Wisata Ketenger.

Kata Kunci: Proses Formulasi Kebijakan, Desa Wisata Ketenger.

ABSTRACT

This research on which this article was based triggered by the curiosity to study the process of policy formulation in the Tourism Village of Ketenger, one of the forms of tourism development in Banyumas Regency. The research was aimed at finding out the process in which the policy to create the tourism village was formulated. It was also aimed at finding out the level of involvement of the society during the formulation process, and further development of the policy. This research was a case study in which

analyze the data. A verification technique based on the criteria of reliability, transferability (replicability), dependability, and exactness, was employed to test the validity of data. The research showed that the formulation of the Tourism Village policy took place in a bottom-up pattern; the ideas and planning of the policy originated from the villagers, the local and village government only provide guidance and development. The society greatly involved in the process and the agenda scheduling took place democratically. The local and village government officials were very supportive. The prospect of the tourism village is high, but labor absorption capacity of the program was low for the time being. The Ketenger Tourism Village should take into account every effort to raise the funds needed to carry out the plan of development activities and issue any publication to spread the information to attract them to visit and aware of the existence of the Ketenger Tourism Village.

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dijalankan pemerintah diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas untuk mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

Pembangunan kepariwisataan ditujukan untuk mengembangkan dan mendayagunakan berbagai potensi kepariwisataan nasional, memberikan nilai tambah ekonomi atas kepemilikan aset masyarakat setempat secara adil, memperkaya kebudayaan nasional, memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat

persahabatan antar bangsa melalui pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan, pengembangan obyek dan daya tarik wisata, peningkatan pemasaran dan promosi serta keterjangkauan, pemantapan pendidikan dan latihan sumberdaya manusia, peningkatan peran serta masyarakat dan usaha nasional khususnya pengusaha kecil menengah, dan koperasi yang dilaksanakan secara terpadu, dan handal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, serta suasana yang aman dan nyaman (GBHN 1998 – 2003).

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pariwisata di Indonesia, menurut Spilanne (1994) pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa.
2. Merosotnya nilai ekspor pada sektor non migas.
3. Prospek pariwisata yang memperlihatkan kecenderungan meningkat.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini telah mampu menunjuk-kan kinerjanya sebagai sektor yang makin prospektif dan handal dalam menopang pembangunan perekonomian nasional. Karena pertumbuhan yang sangat pesat dan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang besar, sektor pariwisata mampu menempati posisi sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga setelah migas dan tekstil dengan nilai sebesar 5,4 milyar dollar AS atau setara dengan Rp 18,9 trilyun pada kurs satu dollar AS = Rp 3.500,-. Penerimaan tersebut memberikan sumbangan sebesar 9,61 persen terhadap PDB nasional serta menyerap angkatan kerja nasional 8 persen atau sebesar 6,6 juta tenaga kerja (Kompas, Juni 2000). Atas dasar kinerja yang baik ini, pemerin-tah menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan yang diharapkan mampu menyum-bang devisa terbesar menggantikan sektor migas akhir tahun 2004.

Tekad tersebut realistis dan tidak berlebihan, apabila kita melihat perkembangan industri pariwisata dalam konteks global yang ada; kemajuan pesat dan prospek yang sangat menjanjikan. Berbagai analisis menyebutkan pariwisata akan menjadi industri terbesar dengan pertumbuhan paling pesat dalam perekonomian jasa, dan akan menjadi penggerak utama perekonomian dunia abad 21 bersama-sama dengan industri

telekomunikasi dan teknologi informasi. World Tourism Organization (1998 dalam Kompas, Juni 2000) juga memperkirakan bahwa mobilitas wisatawan dunia akan mencapai angka 900 juta wisatawan pada tahun 2004, dan kawasan Asia Pasifik (termasuk Indonesia) akan menjadi kawasan tujuan wisata utama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi di antara kawasan lain di dunia. Hal tersebut akan makin memperkuat analisis bahwa pariwisata akan terus berkembang di seluruh dunia sejalan dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah dunia.

Perkembangan sektor pariwisata akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan pola sosial-ekonomi. Sebagai contoh, perubahan pola sosial sebagai akibat perubahan menuju ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based economy) akan menyebabkan tumbuhnya usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, termasuk di dalamnya upaya menciptakan lapangan kerja.

Jadi peranan pariwisata dalam pem-bangunan pada garis besarnya mencakup tiga segi komponen; segi ekonomi, segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan Indonesia). Ketiganya berlaku bagi wisatawan asing/mancane-gara maupun domestik/wisatawan nusantara

desa tersebut menjadi “Desa Wisata” berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 556/1887/2000. Keputusan itu, di samping bertujuan untuk menarik wisatawan, juga menetapkan perlunya melestarikan keindahan alam dan suasana tradisional termasuk bangunan fisik yang diatur dalam peraturan desa. Potensi lain yang dimiliki Desa Ketenger di samping keindahan alam pedesaan yang masih asli adalah; industri tumah tangga, adanya beberapa kelompok kerja (pokja) antara lain; pokja pengelola desa wisata, pokja nilam (minyak atsiri), pokja bambu, pokja pisang, pokja tanaman pangan, forum komunikasi PHBM (Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat). Maka perlu suatu usaha yang serius untuk mengelolanya dan menelitinya agar potensi yang terkandung di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan, baik oleh masyarakat sekitarnya maupun oleh pemerintah daerah.

Suhubungan dengan hal tersebut di atas, menarik untuk dikaji/diteliti bagaimana proses perumusan kebijakan Desa Wisata tersebut berlangsung dan prospek perkembangan kebijakan tersebut untuk selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : (1) Keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perumusan kebijakan Desa Wisata, (2) Sumbangan masyarakat dapat menjadi agenda dalam proses perumusan kebijakan, (3) Sikap

sesungguhnya pejabat pemerintah tingkat kabupaten hingga desa dalam proses perumusan kebijakan tersebut, (4) Prospek perkembangan sektor pariwisata dan perannya dalam penyerapan tenaga kerja di Desa Ketenger.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan merupakan sebuah studi kasus (Marzali, 1980). Sasaran penelitian atau sumber informasi adalah warga masyarakat yang tinggal atau berada di pusat lokasi Desa Wisata Ketenger yaitu di RW 3. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (in-depth interview). Pemilihan sampel terhadap responden dilakukan secara purposive dan snow ball sampling. Analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang dikenal dengan model analisis interaktif. Penelitian ini melibatkan 78 responden terdiri dari 60 orang yang berstatus bukan pejabat pemerintah yang terdiri atas : tokoh masyarakat, 15 orang (25%); petani, 25 orang (41,67%); dan ketiga Pokja (Kelompok Kerja) Pengelola Desa Wisata Ketenger, 20 orang (33,33%); dan 18 responden yang berstatus pejabat pemerintah, yang terdiri atas pejabat di Disparbud 6 responden (satu Kep. Dinas beserta 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Walaupun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis datanya memakai model analisis interaktif, tetapi untuk menjelaskan dan mengkategorikan sajian datanya digunakan analisis deskriptif yang berupa distribusi frekuensi berikut :

1. Keterlibatan Masyarakat

Tingkat keterlibatan masyarakat setempat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perumusan Kebijakan

No	Tingkat Keterlibatan	Jumlah	Persentase
1.	Tinggi	40	66,67
2.	Sedang	12	20,00
3.	Rendah	8	13,33
Total		60	100,00

Sumber : Data Primer Diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keterlibatan 66,67% dari seluruh responden tinggi karena rangkuman jawaban dari responden sejumlah 40 yang mengatakan bahwa Desa Ketenger adalah salah satu desa terdekat dengan obyek wisata Baturraden dan merupakan desa penyangga, dan mereka mempunyai keinginan untuk ambil bagian dalam membangun kepariwisataan agar masyarakat dapat ikut memperoleh penghasilan dari berkembangnya pariwisata. Maka, masyarakat sangat mendukung ditetapkannya desa Ketenger menjadi Desa Wisata. Di samping itu, kebijakan tersebut mereka nilai sebagai

kebijakan yang mempunyai nilai positif, karena bermanfaat untuk masyarakat desa mereka. Mereka mempunyai keterlibatan yang tinggi dalam perumusan kebijakan, 12 responden (20%) rangkuman jawaban mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi aktif, hanya kadang-kadang saja mereka meluangkan waktu ikut berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Hal tersebut adalah karena keterbatasan waktu mereka karena jauhnya tempat kerja mereka. Delapan responden (13,33%) mengatakan bahwa mereka kurang begitu yakin atas keberhasilan dari kebijakan itu sehingga mereka tidak pernah ikut dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

Jadi, berdasarkan hal tersebut, keterlibatan masyarakat atau partisipasi publik jelas melandasi proses pembuatan suatu keputusan, atau dapat dikatakan bahwa proses perumusan kebijakan tersebut berjalan secara demokratis sehingga terdapat keterlibatan publik yang tinggi dalam penyusunan agenda (Jones, 1996).

2. Sumbangan Masyarakat terhadap Proses Perumusan Kebijakan

Seberapa jauh ide dan masukan masyarakat setempat dapat dibahas dalam proses perumusan kebijakan dapat digambarkan dalam Tabel 2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa yang dikategorikan tinggi adalah 38 atau 63,33% yang mengatakan bahwa beberapa masukan maupun usulan dapat dijadikan agenda, walaupun

dipilih yang realistis saja dan yang penanganannya tidak terlalu sulit. Sementara yang sedang adalah 12 (20%) responden yang mengatakan kurang menyatakan kepuasannya terhadap proses penarikan menjadi agenda pembahsan, karena hanya beberapa dari usulan mereka yang dapat diakomodasi menjadi bahan bahasan. Sepuluh responden (16,67%) responden termasuk kategori rendah dengan menyatakan bahwa mereka sangat tidak puas terhadap proses pemilihan agenda, karena tak satupun dari usulan mereka diakomodasi. Menurut responden yang termasuk berkatagori sumbangan tinggi, usulan mereka tidak realisitis.

Tabel 2. Tingkat Sumbangan Masyarakat dalam Proses Perumusan Kebijakan yang Dapat Menjadi Agenda

No.	Tingkat Kontribusi Menjadi Agenda	Jumlah	Persentase
1.	Tinggi	38	63,33
2.	Sedang	12	20,00
3.	Rendah	10	16,67
Total		60	100,00

Sumber : Data Primer Diolah.
Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Jones (1996) bahwa dalam proses penyusunan pokok bahasan yang demokratis merupakan pekerjaan yang rumit, yaitu mengusahakan agar tidak memihak pada kelompok yang kuat dan tidak menimbulkan pemilihan yang bias. Jadi tampaknya pokok bahasan adalah yang paling realistis dan mudah penanganannya. Atau kalau kita merujuk pendapat Walker

(dalam Jones, 1996) yang mengatakan bahwa dalam pemilihan pokok bahasan ada tiga ciri yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, masalah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak; kedua, harus disertai bukti yang meyakinkan bahwa masalah tersebut nyata dan serius; ketiga, penyelesaiannya mudah difahami. Dengan berpedoman ketiga hal ini, dalam penyusunan pokok bahasan tidak terjadi pemihakan pada kelompok yang kuat yang dapat menimbulkan pemilihan yang bias. Seandainya ada konflik di antara kelompok, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui diskusi yang rasional dan tidak terjadi usaha membuat keputusan yang dipaksakan. Masing-masing kelompok sadar untuk meningkatkan keterlibatannya guna bekerjasama dalam satu tim yang kompak (Gitosudarmo dan Sudita, 1997).

3. Prospek Perkembangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dikategorikan dalam Tabel 3, prospek perkembangan pariwisata dapat dikatakan sangat menjanjikan, memberi harapan.

Tabel 3. Prospek Perkembangan Pariwisata terhadap Proses Perumusan Kebijakan

No.	Prospek Perkembangan	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Menjanjikan	36	60,00
2.	Cukup Menjanjikan	14	23,33
3.	Kurang Menjanjikan	10	16,67
Total		60	100,00

Sumber : Data Primer Diolah.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa 60% atau 36 responden memberikan jawaban yang dapat dikategorikan sangat menjanjikan kemudian, 23,33% atau 14 menjawab cukup menjanjikan, di antara mereka ada yang mengkhawatirkan tentang pembiayaan-annya yang masih belum lancar dan sisanya menjawab kurang menjanjikan. Hasil rangkuman jawaban dari 36 responden memang mengatakan bahwa mereka mempunyai keyakinan besar terhadap perkembangan lebih lanjut dari adanya “Desa Wisata” tersebut, bahkan ada beberapa kelompok yang nantinya akan bergerak dalam beberapa kegiatan, misalnya kelompok bunga-bunga, sayur-sayuran, makanan tradisional, kerajinan tangan/cinderamata, pengelolaan penginapan (homes stay) sederhana yang mempunyai ciri khas. Mengenai soal penyerapan tenaga kerja mereka memberikan jawaban bahwa memang untuk sementara belum bisa dilakukan karena aktivitas yang mereka lakukan baru saja dimulai, namun nantinya setelah berkembang mereka berkeyakinan bahwa masalah penyerapan tenaga kerja akan dapat diselesaikan.

Hal ini sesuai dengan teori pengharapan yang dikemukakan oleh Victor Vroom (dalam Anoraga dan Sri Suyati, 1995) yang mengatakan bahwa orang dapat dimotivasi untuk berperilaku kerja tertentu apabila (a) ada harapan bahwa apabila usaha ditingkatkan

akan mendapatkan balas jasa; (b) dengan adanya prestasi dan orang yang bersangkutan ada kemungkinan tujuannya akan tercapai dan ia akan menerima jasa. Demikian pula yang dikatakan Porter dan Lawler (dalam Anuraga dan Sri Suyati, 1995) yang mengatakan teori pengharapan (ekspektasi) menekankan pada orientasi masa menda-tang serta antisipasi individu terhadap hasil yang akan diterima serta adanya kemungkinan besarnya energi yang harus dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan akan menimbulkan suatu usaha. Usaha itu dipadukan dengan kemampuan yang dimiliki serta persepsi atas tugas yang di-jalankan akan menghasilkan prestasi yang merupakan syarat untuk menerima ganjar-an, yang berupa tambahan penghasilan.

Perkembangan pariwisata (Desa Wisata) memang tidak hanya dapat dilihat dari jawaban responden seperti tersebut di atas, tetapi ada beberapa faktor yang patut diperhatikan antara lain; industri kerajinan tangan dan cinderamata, transportasi yang lancar, dan penginapan yang nyaman (Spillane, 1987; dan Pendit, 1987). dapat Proses Formulasi Kebijakan

4. Sikap Pejabat Pemerintah

No.	Sikap Pejabat pemerintah tingkat kabupaten sampai ke desa	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Mendukung	6	33,33
2.	Mendukung	4	22,22
3.	Kurang Mendukung	2	11,11
Total		18	100,00

Sumber : Data Primer Diolah.

Dua belas pejabat pemerintah kabupaten sampai desa (66,67%) mengatakan bahwa pada umumnya mereka sangat setuju dan mendukung adanya kebijakan Desa Wisata. Bahkan Dinas Pariwisata/Disparbud bersama Dinas Perindustrian, dan Dinas Pertanian di samping telah memberikan bimbingan, juga pernah memberikan beberapa kali pelatihan keterampilan antara lain tentang pengelolaan bunga potong. Sikap sangat mendukung pejabat pemerintah dalam hal ini berarti mereka membantu masyarakat dalam menentukan dan memecahkan persoalan mereka, kemudian membimbing dari awal dalam proses penentuan prioritas yang akan dijadikan pokok bahasan (kegiatan). Jadi pejabat pemerintah tidak mendominasi proses penentuan prioritas, tetapi hanya memberikan bimbingan dan pendapat mengenai risiko pokok bahasan yang mereka pilih. Pada akhirnya, masyarakat itu sendiri nantinya yang akan menentukan agenda mana yang mereka pilih, yang oleh Jones (1996) disebut "encourage it happen" artinya mendorong hal itu terjadi. Jadi, pejabat pemerintah lebih bersifat mendorong, bukan membiarkan (let it happen) ataupun membuat itu terjadi (make it happen).

Seperti yang telah dijelaskan di muka, pejabat pemerintah yang dijadikan responden terdiri atas pejabat tingkat kabupaten yang

diwakili oleh pejabat Disparbud, pejabat tingkat kecamatan, dan pejabat tingkat desa yang jumlahnya 18 orang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan Desa Wisata dapat dikatakan tinggi dan berjalan secara demokratis, karena sejak awalnya proses formulasi tersebut berlangsung secara bottoms up. Artinya, gagasan atau ide pemikiran sejak awal memang berasal dari masyarakat desa itu sendiri, sedangkan aparat pemerintah kabupaten sampai desa hanya memberikan bantuan bimbingan dan pembinaan.
2. Tingkat sumbangan pemikiran masyarakat yang dapat dijadikan agenda juga cukup tinggi. Dari beberapa masukan banyak yang dijadikan agenda yang pada akhirnya dipilih hanya yang realistis saja yaitu yang penanganannya mudah. Proses penyusunan agenda berjalan secara demokratis; artinya masyarakat itu sendiri yang menentukan pilihannya, pemerintah hanya memberikan dorongan dan dukungan.
3. Prospek perkembangan Desa Wisata selanjutnya cukup menjanjikan. Masyarakat desa

4. Pejabat pemerintah tingkat kabupaten sampai desa mempunyai sikap yang sama, yaitu sangat menyetujui dan mendukung adanya kebijakan tersebut. Karena itu demi kemajuan dan kesejahteraan semua masyarakat desa tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Aparat dan masyarakat Desa Ketenger hendaknya mulai memikirkan untuk mengupayakan cara memperoleh dana yang mereka butuhkan dalam rangka mempercepat pembangunan Desa Wisata, misalnya secara swadaya atau berusaha mencari investor.
2. Perlu adanya publikasi, walaupun bentuknya sederhana, yang maksudnya memberikan informasi kepada publik tentang adanya Desa Wisata. Sehingga publik tertarik untuk melihatnya, atau wisatawan yang berada di kawasan Baturraden tertarik untuk singgah sebentar.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, P. dan S. Suyati. 1995. Perilaku Keorganisasian.

Pustaka Jaya, Jakarta.

Gitosudarmo, I. dan I.N. Sudita. 1997. Perilaku Keorganisasian. BPFE, Yogyakarta.

Hartono, H. 1974. Perkembangan Pariwisata Kesempatan Kerja dan Permasalahannya. Prisma, No. 2 Th. III.

Jones, C.O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Editor : Nashir Budiman, CV Rajawali Press, Jakarta.

Kompas, edisi Juni 2000.

Marzali, A. 1980. Metode Penelitian Kasus. Berita Antropologi, Tahun XI, No. 37.

Miles, B.M. dan A.M. Huberman. 1994. Analisis Data Kualitatif. UI Press, Jakarta.

Pendit, N.S. 1987. Pengantar Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana. Bina Aksara, Jakarta.

Spilanne, J.J. 1987. Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya. Kanisius, Yogyakarta.

-----, 1994. Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Kanisius, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.

TAP MPR RI No. II/1998, Tentang GBHN Tahun 1998 – 2003.